

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT Berkah Jaya Lestarindo

PT Berkah Jaya Lestarindo merupakan perusahaan jasa logistik yang berlokasi di Kota Semarang dan bergerak dalam bidang pengurusan jasa kepabeanan serta transportasi barang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak Suyatno selaku Direktur Utama dan pada awalnya berfokus sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang melayani pengurusan dokumen ekspor dan impor guna mendukung kelancaran administrasi logistik pelanggan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan jasa logistik dan kepercayaan pelanggan, PT Berkah Jaya Lestarindo mengalami perkembangan dengan memperluas kegiatan usaha ke sektor transportasi darat melalui penyediaan armada truk untuk mendukung distribusi barang impor maupun ekspor.



Gambar 4.1 Logo Perusahaan
Sumber : Data Perusahaan, 2025

Dalam perkembangannya, perusahaan terus mengedepankan pelayanan yang profesional, cepat, dan efisien, sehingga mampu memberikan layanan logistik yang lebih komprehensif, mulai dari pengurusan dokumen kepabeanan hingga kegiatan pengangkutan barang, serta menjaga hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra usaha.

4.1.2 Visi Dan Misi PT Berkah Jaya Lestarindo

1. Visi

“Menjadi Perusahaan Transportasi yang memberikan pelayanan yang unggul sehingga dapat memberikan manfa’at jangka panjang bagi para pelanggan kami.”

2. Misi

Layanan

Memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan pelanggan meliputi keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Teknologi

Menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan teknologi informasi.

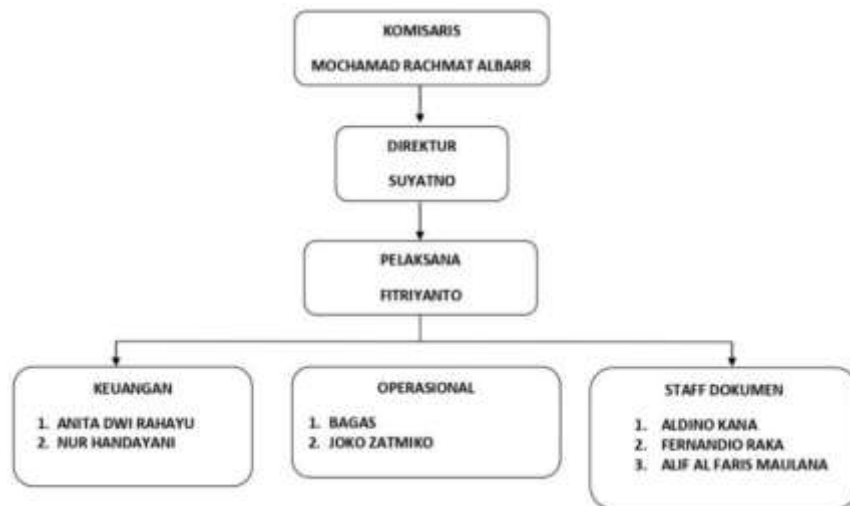
SDM

Menerapkan system manajemen mutu yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

4.1.3 Struktur Organisasi PT Berkah Jaya Lestarindo

Struktur organisasi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan kerja antar individu dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan struktur organisasi sangat penting karena memberikan

kejelasan alur kerja, pembagian tugas, serta tanggung jawab masing-masing bagian sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan adanya struktur yang terorganisir, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, dimana setiap bagian memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Berkah Jaya Lestarindo tahun 2020
Sumber : Data Perusahaan, 2025

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Proses PT Berkah Jaya Lestarindo Dalam Menangani Hambatan Impor

Kacang Tanah Akibat Kebijakan Penghentian Impor

Peran PT Berkah Jaya Lestarindo sangat penting dalam mendukung kelancaran proses impor dalam kegiatan logistik internasional. Dalam pelaksanaannya, proses impor melibatkan beberapa tahapan yang saling

berkaitan, mulai dari pengurusan dokumen hingga pengeluaran barang dari pelabuhan ke gudang importir. Selain itu, proses ini juga melibatkan berbagai pihak yang harus saling berkoordinasi agar barang dapat keluar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pengurusan impor dilakukan secara bertahap mulai dari penerimaan dokumen dari importir, pengajuan dokumen kepabeanan dan karantina, proses *custom clearance*, hingga pengeluaran barang ke gudang importir. Seluruh proses tersebut dilakukan berdasarkan standar operasional perusahaan agar kegiatan impor dapat berjalan dengan lancar, tepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan peran tersebut, PT Berkah Jaya Lestarindo turut membantu menjaga kelancaran proses impor, terutama setelah adanya perubahan persyaratan dan pengetatan pemeriksaan pada komoditas kacang tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor EMKL:

“Prosesnya dimulai dari staf dokumen menerima scan dokumen dari importir, lalu dibuat draft PIB sebelum diajukan ke karantina dan Bea Cukai. Setelah dokumen asli dikirim oleh importir, baru diproses lebih lanjut ke instansi terkait.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki peran dalam proses pengurusan administrasi impor, mulai dari penerimaan dokumen, penyusunan draft PIB, hingga pengajuan dokumen ke pihak karantina dan Bea Cukai. Dalam pelaksanaannya, proses pengurusan dilakukan secara bertahap agar setiap tahapan administrasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga didukung oleh informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menjelaskan bahwa sebelum pengajuan dilakukan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pengecekan kelengkapan dokumen impor, terutama pada komoditas kacang tanah asal India yang memiliki persyaratan dokumen lebih ketat seperti *Invoice*, *Packing List*, *B/L*, *Certificate of Analysis*, *Phytosanitary Certificate*, dan *Certificate of Export (COE)*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagian dokumen memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan serta kesesuaian dokumen sebelum dilakukan proses pengajuan ke instansi terkait. Hal ini menjadi penting karena komoditas kacang tanah asal India memiliki persyaratan dokumen yang lebih ketat dibandingkan komoditas impor lainnya.

Selain itu, informan A-3 selaku Staf Operasional menyatakan bahwa bagian operasional bertugas memastikan kelengkapan dokumen karantina sebelum diajukan ke pihak karantina untuk mendapatkan dokumen SPPMP sebagai dasar proses pemeriksaan barang.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa bagian operasional juga memiliki peran dalam memastikan dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan karantina sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Selain itu, bagian operasional turut melakukan koordinasi pada proses pemeriksaan hingga pengeluaran barang agar tahapan impor dapat berjalan dengan lancar.

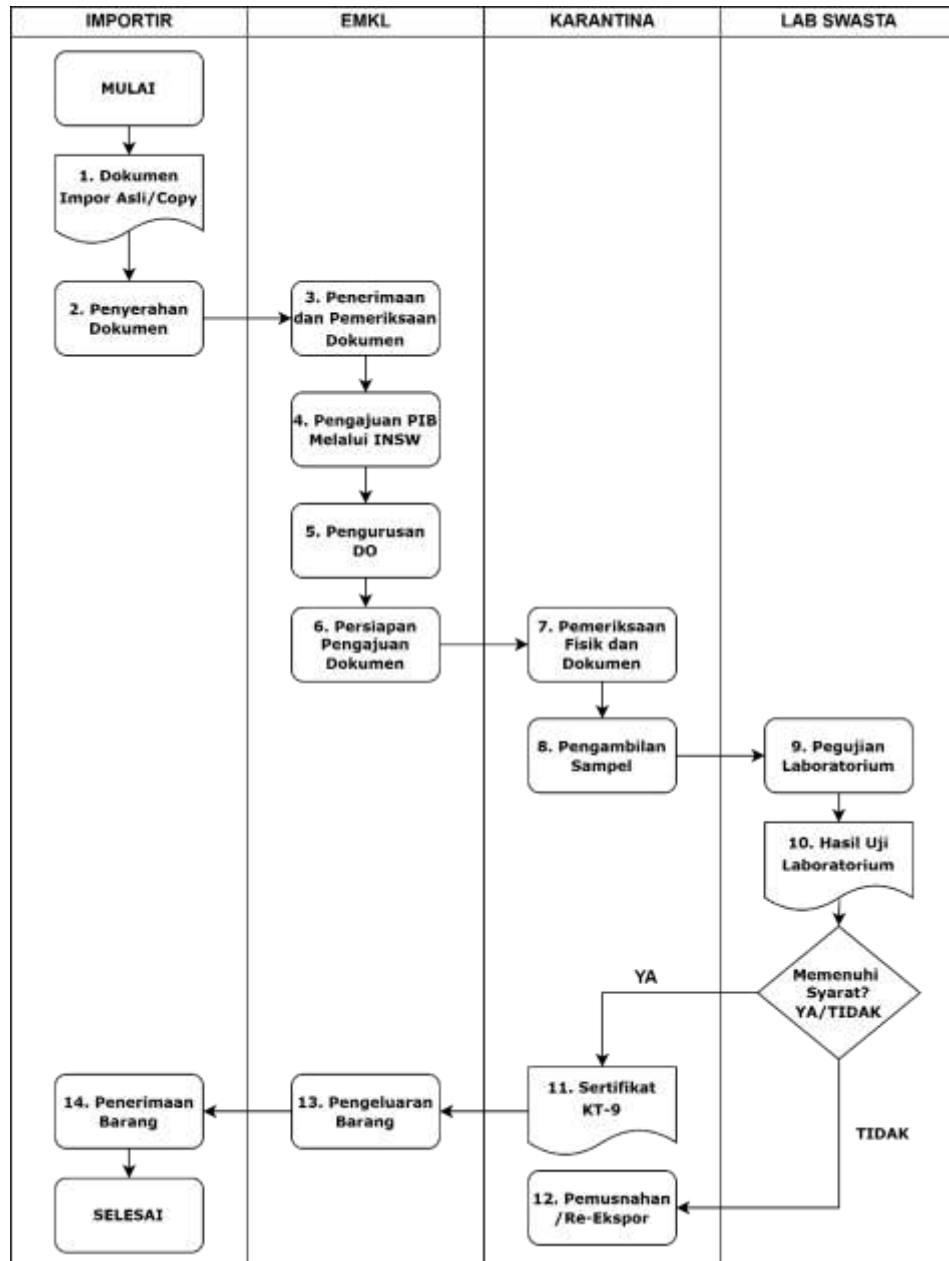
Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa proses pengurusan impor di PT Berkah Jaya Lestarindo

dilakukan secara sistematis dan melibatkan koordinasi antar bagian, mulai dari bagian dokumen hingga operasional. Setiap tahapan proses dilakukan berdasarkan standar operasional perusahaan agar proses pengajuan, pemeriksaan, hingga pengeluaran barang dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Arliansyah, 2026) yang menyatakan bahwa proses pengurusan impor memerlukan pengelolaan dokumen serta koordinasi yang baik antar pihak terkait agar kegiatan *custom clearance* dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, ketelitian dalam pengecekan dokumen menjadi faktor penting dalam meminimalisir hambatan selama proses impor berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, prosedur penanganan impor di PT Berkah Jaya Lestarindo selanjutnya disajikan dalam bentuk *flowchart* untuk menggambarkan setiap tahapan proses secara lebih jelas dan terstruktur. Penyajian ini bertujuan agar memberikan gambaran yang sistematis mengenai praktik yang terjadi di lapangan.

a. Alur Penanganan Impor Karantina di PT Berkah Jaya Lestarindo



Gambar 4. 3 Flowchart penanganan impor karantina PT Berkah Jaya Lestarindo

Sumber: Diolah oleh peneliti 2026

Deskripsi alur penanganan impor karantina di PT Berkah Jaya

Lestarindo sebagai berikut:

Mulai

1. Penyiapan dokumen oleh importir (asli atau salinan).

2. Penyerahan dokumen ke EMKL (PT Berkah Jaya Lestarindo).
3. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh EMKL.
4. Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*.
5. Pengurusan *Delivery Order (DO)* ke pihak pelayaran.
6. Persiapan pengajuan dokumen ke karantina melalui sistem INSW.
7. Pemeriksaan fisik dan dokumen oleh petugas karantina untuk memastikan kacang dalam kondisi bebas dari hama dan penyakit karantina.
8. Pengambilan sample untuk di bawa ke laboratorium swasta yang terakreditasi.
9. Pengujian laboratorium ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kacang sudah sesuai dengan syarat impor karantina indonesia.
10. Hasil uji laboratorium digunakan untuk mengetahui apakah komoditas kacang tanah telah memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku. Hasil pengujian tersebut berbentuk dokumen atau sertifikat hasil uji yang dikirim melalui email kepada PT Berkah Jaya Lestarindo sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
11. Sertifikat KT-9 adalah sertifikat pelepasan karantina tumbuhan yang diterbitkan oleh karantina untuk menjadi bukti sah bahwa kacang tanah telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat serta bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

12. Pemusnahan merupakan tindakan oleh karantina untuk menghancurkan kacang tanah yang tidak memenuhi syarat seperti terindikasi pembawa hama dan penyakit untuk mencegah adanya penyebaran penyakit.
13. Pengeluaran barang dilakukan setelah dokumen KT-9 diterbitkan, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman truk untuk pengambilan kontainer di pelabuhan menuju gudang importir.
14. penerimaan barang dilakukan oleh importir digudang importir
Selesai.

Berdasarkan penjelasan di atas, alur proses penanganan impor menunjukkan tahapan yang dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki peranan penting dimulai dari penerimaan dokumen dari importir, pengurusan administrasi kepabeanan, hingga proses pengeluaran barang dari pelabuhan dan pengiriman ke gudang importir. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan agar proses impor dapat berjalan lancar, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan menjalankan proses pengurusan impor berdasarkan prosedur kerja yang berlaku serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bea Cukai dan Karantina. Kegiatan seperti penerimaan dan pengecekan dokumen, pengajuan PIB, pengurusan *Delivery Order (DO)*, pengajuan ke karantina, pemeriksaan dokumen maupun fisik, hingga pengeluaran barang dilakukan secara sistematis sesuai prosedur yang ada. Penerapan standar operasional ini penting untuk menjaga kelancaran proses, mengurangi

kesalahan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan aturan kepabeanan dan karantina.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara et al., (2024) yang menyatakan bahwa prosedur yang terstruktur dan berbasis SOP dapat mendukung kelancaran proses logistik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penggunaan SOP mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan dalam setiap tahapan. Namun, pada penelitian ini terlihat bahwa proses impor memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan lebih banyak pihak, seperti Bea Cukai, Karantina, dan laboratorium swasta, sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Selain itu, proses penanganan impor oleh PT Berkah Jaya Lestarindo juga melibatkan berbagai pihak seperti importir, pelayaran, karantina, serta laboratorium swasta. Hal ini menunjukkan bahwa proses impor tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik agar setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor, terutama dalam menghadapi kendala yang terjadi di lapangan.

4.2.2 Gap Analysis PT Berkah Jaya Lestarindo Dalam Menghadapi Kebijakan Penghentian Sementara Impor Kacang Tanah Asal India

Dalam pelaksanaan proses impor kacang tanah, setiap tahapan idealnya dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India

menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam proses pengurusan impor yang dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo. Perubahan tersebut berkaitan dengan persyaratan dokumen impor, proses pemeriksaan karantina, serta pelaksanaan kegiatan operasional yang terlibat dalam proses impor.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang seharusnya dicapai dengan kondisi yang terjadi selama proses pengurusan impor. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi akibat perubahan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan Gap Analysis dengan membandingkan kondisi ideal (*desired state*) dan kondisi aktual (*current state*) pada proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo.

Melalui Gap Analysis, kesenjangan yang terjadi dapat diidentifikasi sehingga memberikan gambaran mengenai kondisi yang memerlukan perbaikan dalam proses pengurusan impor. Adapun pembahasan Gap Analysis dalam penelitian ini meliputi kondisi ideal, kesenjangan yang terjadi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

4.2.2.1 Kondisi Ideal Proses Pengurusan Impor Kacang Tanah Asal India

Dalam proses pengurusan impor kacang tanah asal India, terdapat kondisi ideal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan impor. Kondisi ideal tersebut menggambarkan keadaan yang seharusnya dicapai agar proses impor dapat berjalan sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan. Kondisi ideal ini juga digunakan sebagai dasar dalam

melakukan perbandingan terhadap kondisi aktual yang terjadi selama proses pengurusan impor.

Pada penelitian ini, kondisi ideal proses pengurusan impor kacang tanah asal India meliputi penyesuaian persyaratan dokumen impor sesuai ketentuan yang berlaku, koordinasi dengan pihak terkait yang berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan proses impor, serta pelaksanaan proses operasional impor yang berjalan sesuai prosedur dan target waktu yang ditetapkan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang terjadi setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

1. Penyesuaian Persyaratan Dokumen Impor Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Dalam penanganan impor kacang tanah asal India, PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki peran penting dalam proses pengelolaan dan penyesuaian dokumen impor agar sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan karantina yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya melakukan pengurusan administrasi dokumen, tetapi juga memastikan setiap dokumen yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Hal ini menjadi penting karena kelengkapan dan kesesuaian dokumen sangat mempengaruhi kelancaran proses impor, terutama pada tahap pemeriksaan dan *custom clearance*.

Selain itu, dokumen juga menjadi dasar bagi pihak karantina maupun Bea Cukai dalam menentukan proses pemeriksaan serta tindakan lanjutan terhadap barang impor. Oleh karena itu, PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki

peran dalam melakukan pengecekan, penyesuaian, hingga pengajuan dokumen agar proses impor dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen EMKL:

“Setelah dokumen diterima dari importir, hal pertama yang dilakukan yaitu pengecekan kelengkapan dokumen, terutama untuk komoditas kacang tanah asal India yang memiliki persyaratan dokumen lebih keta, seperti *Prior Notice*, dan *Certificate of Export*.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Didukung hasil wawancara dengan A-3 selaku staf operasional, dalam proses pengurusan dokumen juga terdapat ketentuan terkait penggunaan dokumen sebagai berikut:

“Dari operasional setelah dokumen diterima dan dilakukan pengecekan, dokumen diajukan ke karantina melalui sistem INSW. Jika dokumen original belum tersedia, biasanya pengajuan tetap dilakukan menggunakan dokumen *copy* dengan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Sementara itu, informan A-1 selaku Supervisor EMKL menjelaskan bahwa proses pengurusan dokumen dimulai dari penerimaan dokumen scan dari importir untuk penyusunan draft PIB sebelum diajukan ke karantina dan Bea Cukai. Setelah dokumen original diterima, dokumen tersebut kemudian diproses lebih lanjut ke instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat dilihat bahwa proses pengurusan dokumen impor di PT Berkah Jaya Lestarindo dilakukan secara bertahap mulai dari pengecekan dokumen, penyesuaian persyaratan, hingga proses pengajuan ke karantina dan Bea Cukai. Dalam pelaksanaannya, dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses

impor karena setiap tahapan administrasi dan pemeriksaan sangat bergantung pada kelengkapan serta kesesuaian dokumen yang diajukan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa setelah adanya kasus penghentian impor kacang tanah, PT Berkah Jaya Lestarindo melakukan koordinasi dengan pihak importir untuk menyesuaikan dan melengkapi persyaratan dokumen impor berupa Certificate of Export (COE). Penyesuaian tersebut dilakukan karena dokumen COE sebelumnya tidak menjadi persyaratan utama dalam proses pengajuan impor kacang tanah, namun setelah kebijakan penghentian sementara impor diberlakukan, dokumen tersebut diwajibkan sebagai bukti asal dan kelayakan komoditas dari negara pengekspor. Kondisi ini mengharuskan importir untuk memperoleh dokumen COE dari pihak eksportir di India sebelum proses pengajuan dapat dilanjutkan.

Selama menunggu dokumen asli diterima, PT Berkah Jaya Lestarindo melakukan penyesuaian administrasi melalui penggunaan surat pernyataan sebagai persyaratan sementara agar proses pengajuan tetap dapat berjalan. Penambahan dokumen COE tersebut menyebabkan adanya tahapan verifikasi tambahan pada proses pengurusan impor serta meningkatkan intensitas koordinasi antara EMKL, importir, dan pihak karantina. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap komoditas kacang tanah menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya, khususnya pada tahap pengajuan dan pemeriksaan dokumen karantina.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa bagian dokumen dan operasional memiliki koordinasi yang

cukup penting dalam memastikan proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Setiap dokumen yang masuk terlebih dahulu dilakukan pengecekan sebelum diajukan ke sistem INSW maupun instansi terkait agar tidak terjadi kendala pada proses pemeriksaan dan pengeluaran barang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Deliani & Aulia, (2025) yang menyatakan bahwa kelengkapan dan ketepatan dokumen menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor dan *custom clearance*. Selain itu, penyesuaian dokumen terhadap perubahan regulasi juga menjadi bagian penting dalam meminimalisir hambatan selama proses impor berlangsung.

2. Koordinasi Dengan Pihak Terkait Berjalan Sesuai Prosedur dan Kebutuhan Proses Impor.

Dalam proses impor kacang tanah, PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar setiap tahapan impor dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari proses pengurusan dokumen, pemeriksaan barang, hingga proses pengeluaran kontainer dari pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap saling berkaitan dalam mendukung kelancaran proses impor.

Selain itu, koordinasi juga menjadi hal yang penting karena proses impor melibatkan berbagai instansi dan pihak eksternal, seperti importir, pelayaran, pelabuhan, Bea Cukai, karantina, hingga laboratorium swasta. Oleh karena itu, PT Berkah Jaya Lestarindo tidak hanya berperan dalam pengurusan

administrasi impor, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan komunikasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait agar proses impor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor EMKL:

“Koordinasi diawali dengan pihak pelayaran untuk melakukan permintaan *invoice Delivery Order (DO)*.....,proses dilanjutkan dengan koordinasi bersama Bea Cukai dan karantina untuk penjaluran dan pemeriksaan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pihak pelabuhan dalam proses pengeluaran kontainer, serta dengan karantina apabila terdapat pemeriksaan atau pengambilan sampel, hingga barang dapat dikeluarkan dan dikirim ke gudang importir.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan secara bertahap sejak proses pengurusan dokumen hingga pengeluaran barang dari pelabuhan. Dalam proses tersebut, PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki peran sebagai penghubung antara importir dengan instansi maupun pihak terkait lainnya agar proses impor dapat berjalan sesuai prosedur.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menjelaskan bahwa koordinasi lebih difokuskan pada proses pengajuan dokumen ke Bea Cukai dan karantina melalui sistem INSW. Selain itu, bagian dokumen juga melakukan tindak lanjut apabila terdapat kekurangan maupun revisi dokumen agar proses pengajuan tidak mengalami hambatan.

Sementara itu, informan A-3 selaku Staf Operasional menjelaskan bahwa koordinasi di lapangan dilakukan dengan pihak pelayaran, pelabuhan, dan karantina, terutama pada proses pengeluaran kontainer, pemeriksaan barang, hingga pengambilan sampel sebelum barang dapat dikirim ke gudang importir.

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-3 di atas, dapat diketahui bahwa proses impor kacang tanah melibatkan berbagai pihak yang saling berkoordinasi dalam setiap tahapan proses. Pihak-pihak tersebut antara lain importir sebagai pemilik barang, EMKL sebagai pihak yang menangani pengurusan dokumen dan *custom clearance*, pelayaran dalam pengurusan Delivery Order (DO), pelabuhan dalam proses pengeluaran kontainer, Bea Cukai dalam pengawasan kepabeanan, karantina dalam pemeriksaan dokumen dan fisik barang, serta laboratorium swasta dalam proses pengujian sampel komoditas impor.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa koordinasi antar pihak dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pengajuan dokumen hingga pengeluaran barang dari pelabuhan. Dalam praktiknya, komunikasi dan tindak lanjut yang dilakukan antar pihak menjadi faktor penting untuk meminimalisir keterlambatan maupun kendala selama proses impor berlangsung.

Tabel 4. 1 Koordinasi PT Berkah Jaya Lestarindo Dengan Pihak Terkait Dalam Proses Impor Kacang Tanah

No.	Pihak Terkait	Koordinasi	Tujuan Koordinasi
1.	Importir	Penerimaan dan pengecekan dokumen impor, konfirmasi kelengkapan dokumen, serta koordinasi terkait perubahan regulasi impor	Memastikan dokumen sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan karantina
2.	Karantina	Pengajuan dokumen melalui sistem INSW, koordinasi pemeriksaan dokumen, pengambilan sampel, dan pelepasan barang	Mendapatkan persetujuan karantina dan dokumen pelepasan barang

No.	Pihak Terkait	Koordinasi	Tujuan Koordinasi
3.	Bea Cukai	Pengajuan PIB, proses penjaluran, serta pemeriksaan administrasi kepabeanan	Mendukung proses custom clearance dan pengeluaran barang
4.	Pelayaran	Permintaan <i>invoice Delivery Order</i> (DO) dan pengambilan DO	Mendukung proses pengeluaran kontainer dari pelabuhan
5.	Pelabuhan	Koordinasi pengeluaran kontainer dan penjadwalan pemeriksaan barang	Memperlancar proses pengeluaran barang dari pelabuhan
6.	Lab Swasta	Pengujian sampel komoditas kacang tanah	Memastikan hasil uji sesuai ketentuan karantina

Sumber: Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 koordinasi yang dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo memiliki tingkat prioritas yang berbeda pada setiap tahapan proses impor. Koordinasi dengan importir menjadi prioritas utama karena seluruh dokumen impor yang diperlukan dalam proses kepabeanan dan karantina berasal dari importir. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari importir menjadi dasar bagi EMKL untuk melaksanakan proses pengurusan impor pada tahap berikutnya.

Setelah dokumen diterima dan diverifikasi, koordinasi dilanjutkan dengan pihak karantina dan Bea Cukai untuk proses pengajuan dokumen, pemeriksaan, serta penyelesaian administrasi kepabeanan. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan pihak pelayaran dan pelabuhan guna mendukung proses pengeluaran kontainer dari area pelabuhan. Apabila diperlukan pengujian laboratorium, koordinasi juga dilakukan dengan laboratorium swasta sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan karantina. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan PT Berkah Jaya Lestarindo bersifat berurutan sesuai tahapan proses impor, dimana importir menjadi pihak yang memiliki prioritas

koordinasi paling awal karena berperan sebagai penyedia dokumen dan informasi utama dalam kegiatan impor.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pengurusan administrasi dan dokumen, tetapi juga mencakup proses pemeriksaan, pengujian laboratorium, serta pengeluaran barang dari pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, PT Berkah Jaya Lestarindo berperan sebagai pihak yang menghubungkan proses antar instansi maupun pihak terkait agar setiap tahapan impor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Priyohadi et al., (2024) yang menyatakan bahwa koordinasi antar pihak dalam kegiatan impor menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses *custom clearance* dan pengeluaran barang. Selain itu, komunikasi yang baik antar pihak terkait juga membantu mempercepat proses penanganan apabila terjadi kendala dalam kegiatan impor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa koordinasi dengan pihak terkait menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor kacang tanah di PT Berkah Jaya Lestarindo. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap tahapan proses impor dapat berjalan lebih efektif, sehingga potensi hambatan dalam proses pengurusan maupun pengeluaran barang dapat diminimalisir.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Karantina dan Pengeluaran Barang Berjalan Sesuai Prosedur.

Dalam kondisi ideal, pelaksanaan proses impor kacang tanah asal India dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada setiap tahapan kegiatan impor. Proses tersebut dimulai dari penerimaan dokumen impor, pengurusan dokumen kepabeanan dan karantina, pelaksanaan pemeriksaan karantina dan pengujian laboratorium, proses customs clearance, hingga pengeluaran barang dari pelabuhan dan pengiriman kepada importir. Pelaksanaan proses impor yang sesuai prosedur penting untuk menjaga kelancaran kegiatan impor serta memastikan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa setiap tahapan proses impor harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Dari hasil wawancara dengan A-2 selaku Staf Dokumen EMKL menyebutkan kesenjangan administratif terkait dokumen impor sebagai berikut:

"Dari sisi dokumen, sebelum dilakukan pengajuan kami memastikan seluruh dokumen sudah lengkap dan sesuai. Untuk komoditas kacang tanah asal India terdapat persyaratan tambahan berupa *Certificate of Export (COE)*. Selain itu, tanggal *Prior Notice* juga harus sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh melebihi tanggal *Bill of Lading (B/L)*. Setelah dokumen sesuai, baru dilakukan pengajuan PIB dan pengajuan karantina." (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A-3 selaku Staf Operasional:

"Setelah proses dokumen selesai, dilakukan pemeriksaan oleh pihak karantina. Untuk komoditas kacang tanah asal India juga dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium eksternal sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi persyaratan, proses dapat dilanjutkan ke tahap

pengeluaran barang dari pelabuhan dan pengiriman kepada importir." (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses impor dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan. Setiap tahapan memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, adanya penambahan persyaratan berupa Certificate of Export (COE), penyesuaian ketentuan Prior Notice, serta pelaksanaan pengujian laboratorium eksternal menjadi bagian dari prosedur yang harus dipenuhi dalam proses impor kacang tanah asal India setelah adanya perubahan kebijakan impor.

Hasil observasi selama kegiatan magang juga menunjukkan bahwa proses impor kacang tanah yang ditangani oleh PT Berkah Jaya Lestarindo dilaksanakan melalui tahapan penerimaan dokumen dari importir, pengurusan dokumen kepabeanan dan karantina, pelaksanaan pemeriksaan karantina dan pengujian laboratorium, proses customs clearance, hingga pengeluaran barang dari pelabuhan. Tahapan tersebut telah digambarkan pada flowchart proses impor yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan impor setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Christopher (2023) yang menjelaskan bahwa kegiatan impor merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai tahapan administrasi dan operasional yang harus dilaksanakan sesuai prosedur agar proses pemasukan barang dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan setiap tahapan secara terstruktur diperlukan untuk

memastikan bahwa seluruh persyaratan kepabeanan dan karantina telah dipenuhi sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa kondisi ideal proses impor adalah seluruh tahapan kegiatan impor dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada setiap prosesnya. Dengan terlaksananya setiap tahapan sesuai prosedur, proses impor dapat berjalan dengan lebih lancar serta mendukung kelancaran pengeluaran barang hingga diterima oleh importir.

4.2.2.2 Kesenjangan (Gap) Dalam Proses Pengurusan Impor Kacang Tanah Asal India.

Setelah kondisi ideal proses pengurusan impor dijelaskan pada subbab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang terjadi dalam pelaksanaan proses impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo. Kesenjangan tersebut muncul akibat adanya perbedaan antara kondisi yang seharusnya dicapai berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan kondisi aktual yang terjadi setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

Dalam penelitian ini, identifikasi kesenjangan dilakukan dengan membandingkan kondisi ideal dan kondisi aktual pada proses pengurusan impor. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan impor, baik yang berkaitan dengan persyaratan dokumen, koordinasi dengan pihak terkait, maupun pelaksanaan proses impor. Adanya kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya

berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan selama proses pengurusan impor.

Pembahasan kesenjangan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penyesuaian persyaratan dokumen impor, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor. Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual yang terjadi sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan solusi untuk mengurangi kesenjangan yang ditemukan.

1. Kesenjangan dalam Penyesuaian Persyaratan Dokumen Impor

Dalam Dalam kondisi ideal, persyaratan dokumen impor telah tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan proses pengajuan kepada instansi terkait. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor karena dokumen digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan kepabeanan maupun karantina. Namun, setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India, terdapat beberapa penyesuaian persyaratan dokumen yang menyebabkan perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam proses pengurusan impor.

Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya penambahan persyaratan dokumen serta penyesuaian ketentuan administrasi yang harus dipenuhi sebelum proses pengajuan dapat dilakukan. Untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi dalam penyesuaian persyaratan dokumen impor, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat secara langsung dalam

proses pengurusan dokumen impor. Dari hasil wawancara dengan A-2 selaku Staf Dokumen EMKL menyebutkan kesenjangan administratif terkait dokumen impor sebagai berikut:

“Kesenjangan yang sering terjadi itu Original Dokumen belum kita terima dari pihak Importir, karena pengajuan Karantina terutama pada Tanjung Emas Semarang diwajibkan menggunakan Original Dokumen dari negara asal. Tanggal *Prior Notice* juga tidak boleh lebih dari tanggal *B/L*. Selain itu untuk *commodity* kacang India sekarang ada tambahan dokumen COE sesuai regulasi yang berlaku.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan administratif dalam proses impor umumnya berkaitan dengan kelengkapan dokumen serta penyesuaian terhadap persyaratan baru yang berlaku pada komoditas kacang tanah asal India.

Hal tersebut juga didukung oleh informan A-1 selaku Supervisor EMKL yang menjelaskan bahwa keterlambatan dokumen original dari importir sering menjadi kendala dalam proses pengajuan karantina karena dokumen asli menjadi syarat utama dalam pemeriksaan. Selain itu, adanya ketentuan terkait *Prior Notice* serta penambahan dokumen *Certificate of Export* (COE) menyebabkan proses pengurusan dokumen menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan informan A-3 selaku Staf Operasional, menyatakan:

“Kalau dari operasional, kendalanya biasanya proses pengeluaran barang jadi tertahan karena harus menunggu kelengkapan dokumen dari pihak karantina. Jadi barang yang sudah datang belum bisa langsung dikeluarkan sebelum semua persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.” (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan A-1 selaku Supervisor EMKL yang menjelaskan bahwa keterlambatan dokumen original dari importir sering menjadi kendala dalam proses pengajuan karantina karena dokumen asli menjadi syarat utama dalam proses pemeriksaan. Selain itu, adanya ketidaksesuaian *prior notice* dan penambahan dokumen *Certificate of Export (COE)* juga menyebabkan proses pengajuan menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, informan A-3 selaku Staf Operasional menyatakan bahwa hambatan dokumen juga berdampak langsung terhadap kegiatan operasional di lapangan karena barang yang sudah datang belum dapat langsung dikeluarkan sebelum dokumen dinyatakan lengkap oleh pihak karantina. Dalam kondisi tertentu, proses tetap dijalankan menggunakan surat pernyataan sambil menunggu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa setelah adanya kasus penghentian impor kacang asal india, proses pengecekan dokumen menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Bagian dokumen dan operasional juga harus melakukan pengecekan berulang sebelum di kirim ke *Website* INSW atau instansi terkait. Pengecekan kelengkapan terutama pada dokumen yang sering bermasalah seperti *Prior Notice*, *Certificate of Analyses (COA)*, dan *Certificate of Export (COE)*. Hambatan administratif juga muncul ketika dokumen original dari importir belum diterima, sementara proses pengeluaran harus segera di laksanakan, pihak perusahaan harus melakukan penyesuaian administrasi seperti pengajuan

dokumen salinan sementara dan surat pernyataan agar proses tetap berjalan sambil menunggu dokumen original dari importir.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sahara et al., (2024) yang menyatakan bahwa kelengkapan dan ketepatan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor dan *custom clearance*. Selain itu, perubahan regulasi impor menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen yang lebih ketat agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan dalam penyesuaian persyaratan dokumen impor setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India. Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara kondisi ideal, dimana dokumen impor telah tersedia secara lengkap dan sesuai ketentuan sebelum proses pengajuan dilakukan, dengan kondisi aktual yang menunjukkan adanya penambahan persyaratan dokumen serta keterlambatan penerimaan dokumen original dari importir. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengelolaan dokumen serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran proses pengurusan impor.

2. Kesenjangan dalam Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dalam kondisi ideal, koordinasi antara PT Berkah Jaya Lestarindo dengan pihak terkait dalam proses impor dapat berjalan sesuai kebutuhan dan dilakukan pada setiap tahapan proses impor. Koordinasi tersebut melibatkan importir, karantina, laboratorium swasta, pelabuhan, serta pihak lainnya yang

terlibat dalam proses pengurusan impor. Melalui koordinasi yang baik, proses pengajuan dokumen, pemeriksaan, hingga pengeluaran barang dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India, terdapat perubahan persyaratan dan pengetatan pemeriksaan yang menyebabkan proses koordinasi menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam pelaksanaan koordinasi selama proses pengurusan impor. Berdasarkan wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor:

“Hambatan *non tariff* menyebabkan keterlambatan *custom clearance* akibat penahanan barang oleh karantina karena ketidaksesuaian dokumen. Dampaknya, waktu proses yang seharusnya sekitar 1–3 hari bisa menjadi 5–7 hari, ditambah peningkatan biaya operasional seperti uji laboratorium dan penumpukan kontainer. Selain itu, dari pihak EMKL juga sering mendapat tekanan dari customer karena proses pengeluaran barang jadi lebih lama, dan koordinasi antar pihak juga jadi lebih kompleks.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor menyebabkan proses koordinasi yang dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo menjadi lebih intensif dibandingkan sebelumnya. Koordinasi tidak hanya dilakukan untuk pengurusan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeriksaan, pengujian laboratorium, serta penyampaian informasi kepada importir mengenai perkembangan proses impor.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan karantina terhadap komoditas kacang tanah asal India menjadi lebih detail dan membutuhkan

waktu yang lebih lama dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan bagian dokumen harus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak importir maupun karantina untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A-3 selaku Staf Operasional:

“Kalau dari operasional, dampaknya cukup terasa karena proses pengeluaran barang jadi lebih lama. Barang yang seharusnya bisa cepat keluar jadi harus menunggu hasil pemeriksaan dan uji lab dulu. Selain itu, biaya operasional juga ikut bertambah karena ada biaya lab eksternal dan penumpukan kontainer di pelabuhan. Jadi kita juga harus lebih sering koordinasi sama pihak karantina, pelabuhan, dan *customer* terkait perkembangan proses barang.” (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor juga berdampak terhadap kegiatan koordinasi operasional di lapangan. PT Berkah Jaya Lestarindo perlu melakukan koordinasi yang lebih sering dengan berbagai pihak untuk memastikan proses impor tetap dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India, koordinasi yang dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo menjadi lebih intensif dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kebutuhan komunikasi dengan importir terkait kelengkapan dokumen, koordinasi dengan karantina mengenai proses pemeriksaan, serta koordinasi dengan laboratorium swasta terkait hasil pengujian komoditas. Kondisi tersebut menyebabkan proses

pengurusan impor memerlukan waktu koordinasi yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Amanta, (2021) yang menyatakan bahwa penerapan hambatan non tarif dapat mempengaruhi kelancaran proses impor, termasuk pada aspek koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan impor. Pengetatan regulasi dan pemeriksaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan koordinasi untuk memastikan seluruh persyaratan impor dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan dalam koordinasi dengan pihak terkait setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India. Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara kondisi ideal, dimana koordinasi dilakukan sesuai kebutuhan proses impor, dengan kondisi aktual yang menunjukkan meningkatnya intensitas koordinasi akibat penambahan persyaratan dokumen, pemeriksaan karantina yang lebih ketat, serta proses pengujian laboratorium. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pengurusan impor setelah adanya perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India.

3. Kesenjangan dalam Pelaksanaan Proses Impor.

Dalam kondisi ideal, pelaksanaan proses impor kacang tanah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga setiap tahapan proses dapat berjalan secara efektif dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Proses

pemeriksaan karantina, pengujian laboratorium, hingga pengeluaran barang seharusnya dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang menyebabkan keterlambatan proses impor. Namun, setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan proses impor yang menyebabkan perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Berdasarkan wawancara dengan informan A-3 selaku Staf Operasional:

“Tidak ada barang impor khususnya kacang yang masuk yang seharusnya banyak dan harus terus update ke pihak terkait tentang pembatasan impor kacang sampai kapan. Ditambah uji lab dari luar dengan lokasi yang jauh menambah *cost* dan hasil lab yang keluar lama menjadi proses pengeluaran barang yang seharusnya 1–3 hari selesai, sekarang bisa 5–7 hari baru selesai.” (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan proses impor di lapangan. Dampak tersebut terlihat dari bertambahnya waktu proses pengeluaran barang, meningkatnya biaya operasional, serta berkurangnya jumlah komoditas kacang tanah yang masuk dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa setelah adanya perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India, proses pemeriksaan menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pengujian laboratorium dilakukan melalui laboratorium eksternal yang berlokasi sekitar 18 km dari pelabuhan dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Kondisi tersebut menyebabkan staf operasional harus mengantarkan sampel secara langsung ke laboratorium untuk dilakukan pengujian.

Pelaksanaan pengujian laboratorium melalui laboratorium eksternal menyebabkan proses impor memerlukan tambahan biaya operasional dan waktu penyelesaian yang lebih lama. Barang yang sebelumnya dapat dikeluarkan dalam waktu sekitar 1–3 hari setelah proses pengajuan, pada kondisi aktual membutuhkan waktu sekitar 5–7 hari karena harus menunggu hasil pengujian laboratorium dan persetujuan dari pihak karantina sebelum barang dapat dilepaskan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Christopher, (2023) yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan impor dan penerapan hambatan non tarif dapat mempengaruhi kelancaran proses impor, terutama pada aspek pemeriksaan barang, waktu penyelesaian proses impor, serta kegiatan operasional di lapangan. Pengetatan regulasi menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan proses impor agar seluruh tahapan tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan proses impor setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India. Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara kondisi ideal, dimana proses impor dapat berjalan sesuai prosedur dan target waktu yang ditetapkan, dengan kondisi aktual yang menunjukkan adanya penambahan tahapan pemeriksaan serta pengujian laboratorium yang menyebabkan proses pengeluaran barang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor memberikan pengaruh

terhadap pelaksanaan proses impor sehingga diperlukan penyesuaian dalam kegiatan operasional agar proses pengurusan impor tetap dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Gap Proses Pengurusan Impor Kacang Tanah Asal India

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pembahasan kesenjangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo. Perbedaan tersebut muncul setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India yang menyebabkan penyesuaian pada persyaratan dokumen, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor.

Kondisi ideal dalam proses pengurusan impor mengharuskan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan prosedur, persyaratan, dan target waktu yang telah ditetapkan. Namun, pada kondisi aktual terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan proses pengurusan impor memerlukan penyesuaian dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut terlihat dari adanya penambahan persyaratan dokumen, meningkatnya kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait, serta bertambahnya waktu proses impor akibat pengetatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium.

Untuk memperjelas kesenjangan yang terjadi, peneliti melakukan analisis menggunakan metode Gap Analysis dengan membandingkan kondisi ideal dan kondisi aktual pada setiap aspek yang berkaitan dengan proses pengurusan impor. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi

kesenjangan yang terjadi pada proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, hasil Gap Analysis proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Analisis Gap Hambatan Impor Kacang Tanah Asal India pada PT Berkah Jaya Lestarindo Semarang

No.	Hambatan	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal	Gap
1.	Dokumen original terlambat diterima	Dokumen asli dari negara asal belum diterima saat proses pengajuan karantina dilakukan	Dokumen asli telah tersedia sebelum proses pengajuan karantina	Terjadi keterlambatan proses administrasi dan pengajuan karantina
2.	Ketidaksesuaian <i>Prior Notice</i>	Tanggal <i>Prior Notice</i> melebihi tanggal <i>Bill of Lading</i>	Data <i>Prior Notice</i> sesuai dengan seluruh dokumen pengapalan	Barang tertahan (<i>hold</i>) dan memerlukan perbaikan dokumen
3.	Penambahan dokumen <i>Certificate Of Export (COE)</i>	Importir harus melengkapi dokumen tambahan akibat kebijakan baru	Seluruh dokumen persyaratan telah tersedia sejak awal proses impor	Proses pengurusan dokumen menjadi lebih kompleks
4.	Pemeriksaan karantina lebih detail	Pemeriksaan dilakukan lebih ketat dan lebih lama	Pemeriksaan berjalan sesuai prosedur normal	Waktu pemeriksaan dan clearance bertambah
5.	Uji laboratorium eksternal	Sampel harus diuji pada laboratorium eksternal	Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam satu tahapan pemeriksaan	Waktu tunggu hasil laboratorium bertambah
6.	Keterlambatan pengeluaran barang	Barang baru dapat dikeluarkan setelah hasil laboratorium terbit	Barang dapat segera diproses setelah pemeriksaan selesai	Proses clearance menjadi lebih lama
7.	Penambahan biaya operasional	Terjadi biaya laboratorium dan penumpukan kontainer	Biaya operasional tetap sesuai rencana awal	Terjadi peningkatan biaya impor

Sumber: Diolah peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 Analisis Gap Hambatan Impor Kacang Tanah Asal India pada PT Berkah Jaya Lestarindo, diketahui bahwa terdapat beberapa kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam proses pengurusan impor. Kesenjangan tersebut meliputi penyesuaian persyaratan dokumen impor, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

Pada aspek persyaratan dokumen, kesenjangan terlihat dari adanya penambahan dokumen Certificate of Export (COE), ketidaksesuaian Prior Notice, serta keterlambatan penerimaan dokumen original dari importir. Pada aspek koordinasi, kesenjangan terjadi karena meningkatnya kebutuhan koordinasi dengan importir, karantina, dan laboratorium swasta akibat adanya pengetatan pemeriksaan dan persyaratan impor. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan proses impor, kesenjangan terlihat dari bertambahnya waktu proses pemeriksaan, pengujian laboratorium eksternal, serta waktu pengeluaran barang yang menjadi lebih lama dibandingkan kondisi sebelumnya.

Kesenjangan tersebut muncul sebagai dampak dari perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India yang menyebabkan bertambahnya persyaratan administrasi dan pengawasan terhadap komoditas impor. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengurusan impor memerlukan penyesuaian pada beberapa tahapan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil identifikasi gap tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan solusi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo.

4.2.2.3 Solusi Yang Diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo Untuk Mengatasi Hambatan Akibat Kebijakan Penghentian Impor

Berdasarkan hasil Gap Analysis yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo. Kesenjangan tersebut meliputi penyesuaian persyaratan dokumen impor, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor setelah adanya kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.

Kesenjangan yang terjadi menunjukkan bahwa proses pengurusan impor memerlukan berbagai penyesuaian agar tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambahan persyaratan dokumen, meningkatnya kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait, serta bertambahnya waktu proses pemeriksaan dan pengeluaran barang menjadi beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan kegiatan impor.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam proses pengurusan impor. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut, PT Berkah Jaya Lestarindo menerapkan beberapa solusi yang mencakup aspek pengelolaan dokumen impor, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor agar kegiatan pengurusan impor dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Solusi Terhadap Kesenjangan Penyesuaian Persyaratan Dokumen Impor.

Dalam menghadapi kesenjangan pada penyesuaian persyaratan dokumen impor, PT Berkah Jaya Lestarindo melakukan berbagai upaya agar proses pengurusan impor tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan karena pada kondisi aktual masih ditemukan adanya keterlambatan penerimaan dokumen original, penambahan persyaratan dokumen, serta perubahan ketentuan impor kacang tanah asal India yang menyebabkan proses pengurusan dokumen menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor:

“Kalau dokumen original dari importir belum sampai, biasanya kita tetap ajukan dulu menggunakan dokumen *copy* dengan surat pernyataan agar proses administrasi tetap bisa berjalan dan tidak terlalu lama tertahan..” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT Berkah Jaya Lestarindo melakukan penyesuaian dalam proses administrasi dengan tetap mengupayakan pengajuan dokumen agar proses impor dapat berjalan sambil menunggu kelengkapan dokumen original dari importir

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menyatakan bahwa sebelum proses pengajuan dilakukan, pihak perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada importir terkait perubahan regulasi terbaru, terutama pada komoditas kacang tanah asal India yang memiliki persyaratan lebih ketat. Selain itu, apabila terdapat kesalahan dokumen setelah kapal berangkat, importir diwajibkan membuat surat

pernyataan agar proses pengajuan tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa bagian dokumen dan operasional memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan penyesuaian terhadap persyaratan dokumen impor. Setiap dokumen yang diterima dari importir terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan penyesuaian sebelum diajukan melalui sistem INSW maupun instansi terkait agar proses pengajuan dapat berjalan dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Moisé & Sorescu, (2021) yang menyatakan bahwa penyesuaian dokumen serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses impor dan custom clearance. Selain itu, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi juga diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan impor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa solusi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo lebih difokuskan pada penyesuaian proses pengajuan dokumen melalui penggunaan dokumen salinan sementara, surat pernyataan, serta penyampaian informasi terkait perubahan persyaratan kepada importir. Solusi tersebut membantu mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengurusan dokumen sehingga proses impor tetap dapat berjalan meskipun terdapat perubahan persyaratan administrasi.

Namun, berdasarkan hasil analisis peneliti, solusi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan yang terjadi karena proses pengurusan

impor tetap memerlukan dokumen original dan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, solusi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo dapat dikatakan cukup efektif karena mampu mengurangi keterlambatan proses pengajuan dokumen serta membantu menjaga kelancaran proses impor selama masa penyesuaian terhadap perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India.

2. Solusi Terhadap Kesenjangan Koordinasi Dengan Pihak Terkait.

Dalam menghadapi kesenjangan koordinasi dengan pihak terkait, PT Berkah Jaya Lestarindo melakukan berbagai upaya agar proses pengurusan impor tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari proses pengajuan dokumen, pemeriksaan barang, hingga pengeluaran kontainer dari pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, komunikasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran proses pengurusan impor, terutama setelah adanya perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India. Berdasarkan wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor:

“Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dengan importir dan instansi terkait. Selain itu, dilakukan juga pengajuan sebelum kapal sandar (*pre-notification*) serta *follow up* ke pihak terminal agar proses pengajuan dan pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan secara bertahap dengan berbagai pihak terkait agar proses pengajuan dokumen, pemeriksaan, dan pengeluaran barang dapat berjalan lebih efektif.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menyatakan bahwa koordinasi lebih banyak dilakukan dengan pihak karantina dan importir, terutama apabila terdapat perubahan aturan atau kekurangan dokumen. Selain itu, bagian dokumen juga terus melakukan pembaruan informasi terkait regulasi impor kacang tanah asal India agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A-3 selaku Staf Operasional:

“Dari operasional, kita terus koordinasi dengan pihak karantina, terutama petugas karantina tumbuhan, untuk *follow up* proses pemeriksaan, pengambilan sampel, sampai proses pelepasan barang.” (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi operasional dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan dan pelepasan barang dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa koordinasi antar pihak dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pengajuan dokumen hingga pengeluaran barang dari pelabuhan. Dalam praktiknya, komunikasi yang dilakukan dengan importir, karantina, terminal, dan pihak pelayaran menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pengurusan impor.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sahara et al., (2024) yang menyatakan bahwa koordinasi antar pihak dalam kegiatan impor menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses custom clearance dan pengeluaran barang. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu

mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul selama proses impor berlangsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa strategi koordinasi dengan pihak terkait menjadi salah satu solusi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo untuk mengurangi kesenjangan koordinasi dalam proses pengurusan impor. Melalui komunikasi, tindak lanjut, serta pembaruan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan, proses pengurusan impor dapat berjalan lebih efektif dan membantu mempercepat penyelesaian setiap tahapan proses impor.

Namun, berdasarkan hasil analisis peneliti, solusi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan yang terjadi karena beberapa tahapan proses masih bergantung pada pihak eksternal, seperti proses pemeriksaan karantina dan penerbitan hasil uji laboratorium yang memerlukan waktu tertentu sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, strategi koordinasi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo dapat dikatakan cukup efektif karena membantu mengurangi keterlambatan proses pengurusan impor serta mendukung kelancaran komunikasi antar pihak yang terlibat.

3. Solusi Terhadap Kesenjangan Pelaksanaan Proses Impor.

Dalam menghadapi kesenjangan pada pelaksanaan proses impor, PT Berkah Jaya Lestarindo menerapkan beberapa upaya untuk menjaga kelancaran proses clearance dan pengeluaran barang setelah adanya perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India. Upaya tersebut dilakukan karena pada kondisi aktual terjadi penambahan tahapan pemeriksaan, persyaratan tambahan, serta

proses pengujian laboratorium yang menyebabkan waktu pengurusan impor menjadi lebih lama dibandingkan kondisi ideal yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan informan A-1 selaku Supervisor:

“Strateginya biasanya kita melakukan pengajuan sebelum kapal sandar (*pre-notification*) supaya proses bisa lebih cepat jalan. Selain itu, kita juga melakukan *follow up* ke pihak terminal dan tetap mengajukan dokumen sementara menggunakan surat pernyataan agar proses *clearance* tidak tertunda.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mempercepat pelaksanaan proses impor melalui pengajuan lebih awal dan persiapan administrasi sebelum barang tiba di pelabuhan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan A-2 selaku Staf Dokumen yang menyatakan bahwa pengecekan dokumen dilakukan sejak awal, mulai dari isi dokumen, deskripsi barang, hingga tanggal dokumen agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengajuan. Selain itu, perusahaan juga mengupayakan agar dokumen original dari negara asal dapat segera diterima untuk mempercepat proses pengajuan karantina dan penerbitan dokumen pelepasan barang.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A-3 selaku Staf Operasional:

“Dari operasional, biasanya kita mengikuti kelengkapan tambahan yang diminta pihak karantina, terutama jika ada permintaan lab ulang sampel supaya proses pelepasan barang bisa lebih cepat.” (Wawancara dilakukan pada 4 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menyesuaikan pelaksanaan proses impor dengan memenuhi persyaratan tambahan yang

ditetapkan oleh pihak karantina agar proses pemeriksaan dan pelepasan barang dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melihat bahwa perusahaan melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan proses impor, seperti mempersiapkan pengajuan dokumen sebelum kapal tiba, melakukan pengecekan dokumen secara lebih detail, serta menindaklanjuti proses pemeriksaan dan pengujian laboratorium agar tidak terjadi keterlambatan yang berlebihan dalam proses pengeluaran barang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rojas-Reyes et al., (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan proses impor, pengecekan dokumen secara menyeluruh, serta kesiapan dalam memenuhi persyaratan pemeriksaan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses custom clearance dan pengeluaran barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa solusi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo lebih difokuskan pada percepatan pelaksanaan proses impor melalui persiapan administrasi sejak awal, pemenuhan persyaratan tambahan, serta penyesuaian terhadap prosedur pemeriksaan yang berlaku. Solusi tersebut membantu mengurangi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam pelaksanaan proses impor sehingga proses clearance dan pengeluaran barang dapat berjalan dengan lebih baik.

Namun, berdasarkan hasil analisis peneliti, solusi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan yang terjadi karena masih terdapat

faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, seperti keterlambatan penerimaan dokumen original dari negara asal dan lamanya proses penerbitan hasil laboratorium eksternal. Meskipun demikian, solusi yang diterapkan PT Berkah Jaya Lestarindo dapat dikatakan cukup efektif karena mampu mengurangi keterlambatan proses impor serta membantu menjaga kelancaran kegiatan pengurusan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Output Penelitian

Sebagai output penelitian ini, disusun action plan berdasarkan hasil Gap Analysis yang telah dilakukan terhadap proses pengurusan impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual pada aspek penyesuaian persyaratan dokumen impor, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan proses impor. Kesenjangan tersebut ditunjukkan oleh adanya keterlambatan penerimaan dokumen original, penyesuaian persyaratan dokumen impor, meningkatnya kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait, serta bertambahnya tahapan pemeriksaan karantina dan pengujian laboratorium yang menyebabkan proses pengurusan impor memerlukan waktu lebih lama dibandingkan kondisi yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengurusan impor. Oleh karena itu, action plan disusun sebagai bentuk implementasi solusi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu action plan internal dan action plan eksternal. Action plan

internal berfokus pada perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Berkah Jaya Lestarindo, sedangkan action plan eksternal berfokus pada penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses impor.

4.3.1 Action Plan Internal

Action plan internal disusun berdasarkan hasil identifikasi gap yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal pada aspek internal perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proses operasional, pengelolaan dokumen, serta kesiapan sumber daya manusia. Kesenjangan tersebut terlihat dari perlunya penyesuaian dalam pengelolaan dokumen impor, peningkatan ketelitian administrasi, serta penguatan monitoring proses impor setelah adanya perubahan kebijakan impor kacang tanah asal India. Selain itu, perubahan persyaratan dan prosedur impor juga menuntut perusahaan untuk memiliki sistem kerja yang lebih adaptif dan terstandarisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, action plan internal dirumuskan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan yang masih terjadi pada proses yang dapat dikendalikan langsung oleh PT Berkah Jaya Lestarindo. Melalui perbaikan pada aspek operasional, administrasi, dan koordinasi internal, diharapkan proses pengurusan impor dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan action plan internal yang disusun berdasarkan hasil penelitian:

Tabel 4.3 Action Plan Internal Penanganan Hambatan Impor Kacang Tanah di PT Berkah Jaya Lestarindo Semarang

No.	Action Plan	Supervisor	Staf Dokumen	Staf Oprasional
1.	Penyusunan SOP impor saat kebijakan berubah	U	P	T
2.	Standardisasi checklist dokumen impor	P	U	T
3.	Digitalisasi arsip dokumen	T	U	P
4.	Monitoring shipment & tracking	P	T	U
5.	Pelatihan regulasi impor terbaru	U	P	T
6.	Identifikasi negara alternatif impor	U	T	P
7.	Diversifikasi layanan EMKL	U	P	T
U: Utama, P: Pendukung, T: Terkait				

Sumber: Data Olahan Peneliti 2026

Berikut penjelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap solusi yang dirumuskan berdasarkan klasifikasi U (Utama) adalah pihak yang bertanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan, P (Pendukung) berperan membantu pelaksanaan secara teknis maupun administratif, sedangkan T (Terkait) adalah pihak yang terlibat atau terdampak dalam proses implementasi solusi. Klasifikasi ini digunakan untuk memperjelas pembagian peran dalam implementasi *action plan* agar setiap pihak memiliki fungsi yang jelas dalam pelaksanaan solusi.

1. Penyusunan SOP impor saat terjadi perubahan kebijakan

Penyusunan SOP impor saat terjadi perubahan kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan proses operasional tetap berjalan secara

terstruktur di tengah dinamika regulasi impor. Supervisor berperan sebagai penanggung jawab utama dalam merumuskan dan menetapkan standar operasional yang sesuai dengan kondisi kebijakan yang berlaku. Staf dokumen berperan sebagai pendukung dalam penyusunan alur administrasi dan penyesuaian prosedur dokumen impor, sedangkan staf operasional berperan dalam implementasi SOP tersebut pada kegiatan lapangan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan setiap perubahan kebijakan dapat direspons secara lebih cepat dan sistematis.

2. Standardisasi checklist dokumen impor

Standardisasi checklist dokumen impor dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data dalam proses kepabeaian. Staf dokumen berperan sebagai pihak utama dalam menyusun dan memastikan kelengkapan checklist dokumen yang digunakan dalam setiap proses impor. Supervisor berperan sebagai pihak pendukung yang melakukan pengawasan dan validasi terhadap kesesuaian standar yang diterapkan, sedangkan staf operasional berperan dalam memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dipenuhi pada saat proses pengiriman barang. Dengan adanya standardisasi ini, proses verifikasi dokumen dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol.

3. Digitalisasi arsip dokumen impor

Digitalisasi arsip dokumen impor dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan akses dokumen dalam proses operasional EMKL. Staf dokumen berperan sebagai penanggung jawab

utama dalam pengelolaan dan penginputan data ke dalam sistem digital. Staf operasional berperan sebagai pendukung dalam memastikan kelengkapan dokumen fisik sebelum proses digitalisasi dilakukan, sedangkan supervisor berperan dalam pengawasan implementasi sistem arsip digital agar berjalan sesuai standar perusahaan. Dengan digitalisasi ini, risiko kehilangan dokumen dan keterlambatan akses data dapat diminimalkan.

4. Monitoring shipment & tracking

Monitoring shipment dan tracking dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengiriman barang dapat dipantau secara real-time dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Staf operasional berperan sebagai penanggung jawab utama dalam melakukan pemantauan pergerakan barang di lapangan. Staf dokumen berperan sebagai pendukung dalam menyediakan data pendukung terkait status dokumen pengiriman, sedangkan supervisor berperan dalam pengawasan keseluruhan proses monitoring untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam proses distribusi informasi. Sistem ini membantu meningkatkan ketepatan waktu dalam proses impor.

5. Pelatihan regulasi impor terbaru

Pelatihan regulasi impor terbaru dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap perubahan aturan kepabeanan dan perdagangan internasional. Supervisor berperan sebagai penanggung jawab utama dalam menginisiasi dan mengarahkan program pelatihan. Staf dokumen dan staf operasional berperan sebagai peserta sekaligus

pendukung dalam implementasi hasil pelatihan pada kegiatan operasional sehari-hari. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh staf memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan regulasi impor.

6. Identifikasi negara alternatif impor

Identifikasi negara alternatif impor dilakukan sebagai strategi mitigasi risiko terhadap ketergantungan pada satu negara asal barang. Supervisor berperan sebagai penanggung jawab utama dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait negara alternatif. Staf dokumen berperan dalam menyediakan data pendukung terkait persyaratan dokumen impor dari negara lain, sedangkan staf operasional berperan dalam memberikan masukan teknis terkait proses pengiriman dari berbagai rute logistik. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok impor.

7. Diversifikasi layanan EMKL

Diversifikasi layanan EMKL dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap satu jenis layanan impor tertentu serta meningkatkan daya saing perusahaan. Supervisor berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengembangan strategi bisnis perusahaan. Staf dokumen berperan sebagai pendukung dalam menyesuaikan kebutuhan administrasi layanan baru, sedangkan staf operasional berperan dalam implementasi layanan di lapangan. Dengan adanya diversifikasi ini, perusahaan dapat memperluas cakupan layanan dan meningkatkan fleksibilitas operasional.

Secara keseluruhan, *action plan internal* diarahkan pada penguatan sistem operasional dan administrasi perusahaan agar proses impor dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan.

4.3.2 Action Plan Eksternal

Selain kesenjangan yang berasal dari aspek internal perusahaan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan yang berkaitan dengan faktor eksternal dalam proses pengurusan impor. Proses impor kacang tanah tidak hanya melibatkan PT Berkah Jaya Lestarindo dan importir, tetapi juga berbagai pihak lain seperti instansi kepabeanan, karantina, pelayaran, terminal, dan laboratorium pengujian. Kesenjangan yang terjadi, seperti bertambahnya tahapan pemeriksaan, penyesuaian persyaratan impor, serta perlunya koordinasi yang lebih intensif antar pihak, menunjukkan bahwa kelancaran proses impor sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai impor.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya dilakukan secara internal oleh perusahaan, tetapi juga melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, *action plan* eksternal disusun sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi informasi, serta tindak lanjut proses impor dengan pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan pengurusan impor. Berikut merupakan *action plan* eksternal yang disusun berdasarkan hasil penelitian:

Tabel 4.4 Action Plan Eksternal Penanganan Hambatan Impor Kacang Tanah di PT Berkah Jaya Lestarindo

No.	Action Plan	EMKL	Importir	Bea Cukai	Karantina	Lab Eksternal
1.	Koordinasi perubahan negara asal impor	U	U	T	-	-
2.	Penyesuaian dokumen impor	U	U	T	P	-
3.	Sinkronisasi PIB & kepabeanan	U	T	P	-	-
4.	Pemeriksaan karantina barang	U	T	U	U	-
5.	Pengujian kualitas kacang tanah	U	T	T	P	U
6.	Verifikasi supplier baru	U	U	P	-	-
U: Utama, D: Pendukung, T: Terkait						

Sumber: Data Olahan Peneliti 2026

Berikut penjelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap solusi yang dirumuskan berdasarkan klasifikasi U (Utama) adalah pihak yang bertanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan, P (Pendukung) berperan membantu pelaksanaan secara teknis maupun administratif, sedangkan T (Terkait) adalah pihak yang terlibat atau terdampak dalam proses implementasi solusi. Klasifikasi ini digunakan untuk memperjelas pembagian peran dalam implementasi *action plan* agar setiap pihak memiliki fungsi yang jelas dalam pelaksanaan solusi.

1. Koordinasi perubahan negara asal impor

Koordinasi perubahan negara asal impor dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan penghentian sementara impor dari negara tertentu. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam menghubungkan komunikasi antara importir dan pihak terkait. Importir berperan sebagai pihak utama dalam penyediaan informasi dan penentuan negara asal alternatif, sedangkan bea cukai berperan sebagai pihak pendukung dalam penyesuaian data kepabeanan. Karantina tidak terlibat langsung namun tetap menjadi pihak terkait dalam proses verifikasi dokumen. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan transisi negara asal impor dapat berjalan tanpa mengganggu kelancaran proses logistik.

2. Penyesuaian dokumen impor

Penyesuaian dokumen impor dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang digunakan dengan persyaratan regulasi yang berlaku. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam proses penyesuaian dan pengajuan dokumen. Importir berperan sebagai pihak utama dalam penyediaan dokumen asli yang diperlukan, sedangkan bea cukai berperan sebagai pihak pendukung dalam proses verifikasi dokumen kepabeanan. Karantina berperan sebagai pihak pendukung dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis, sementara laboratorium eksternal berperan dalam mendukung verifikasi mutu barang. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses clearance barang impor.

3. Sinkronisasi PIB & kepabeanan

Sinkronisasi PIB dan kepabeanan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara dokumen pemberitahuan impor barang dengan sistem kepabeanan. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam proses pengajuan dan sinkronisasi data. Bea cukai berperan sebagai pihak utama dalam verifikasi dan validasi data kepabeanan, sedangkan importir berperan sebagai pihak pendukung dalam penyediaan data pendukung yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan data yang dapat menghambat proses clearance.

4. Pemeriksaan karantina barang

Pemeriksaan karantina barang dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas impor memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang berlaku. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengurusan proses pemeriksaan. Karantina berperan sebagai pihak utama dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kelayakan barang, sedangkan importir berperan sebagai pihak pendukung dalam penyediaan dokumen pendukung. Bea cukai berperan sebagai pihak terkait dalam proses administratif. Proses ini merupakan tahapan penting dalam menjamin keamanan pangan.

5. Pengujian kualitas kacang tanah

Pengujian kualitas kacang tanah dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan standar mutu barang impor. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam koordinasi pengujian laboratorium. Laboratorium eksternal berperan sebagai pihak utama dalam pelaksanaan

uji kualitas, sedangkan importir berperan sebagai pihak pendukung dalam penyediaan sampel barang. Bea cukai dan karantina berperan sebagai pihak terkait dalam proses verifikasi hasil uji. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor memenuhi standar yang ditetapkan.

6. Verifikasi supplier baru

Verifikasi supplier baru dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko dalam mencari sumber impor alternatif. EMKL berperan sebagai penanggung jawab utama dalam proses koordinasi dan verifikasi awal. Importir berperan sebagai pihak utama dalam penentuan dan validasi supplier, sedangkan bea cukai berperan sebagai pihak pendukung dalam penyesuaian data kepabeanan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa supplier baru memenuhi standar regulasi impor yang berlaku.

Secara keseluruhan, *action plan eksternal* menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak yang terlibat dalam proses impor guna mendukung kelancaran alur logistik serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.